



TERUS DIKEBUT: Pemerintah Kota Jogja akan segera menerbitkan regulasi mengatur aktivitas sepanjang kawasan sumbu filosofis yang harus steril dari aktivitas ekonomi, termasuk penyewaan otoped dan skuter listrik.

Regulasi Atur Aktivitas di Sumbu Filosofis Segera Diterbitkan

JOGJA, Radar Jogja - Menyusul SE Gubernur DIJ No 551/ 461, Pemkot Jogja akan segera terbitkan regulasi mengatur aktivitas sepanjang Tugu Pal Putih, Malioboro, dan Titik Nol Kilometer. Karena kawasan sumbu filosofis atau garis imajiner harus steril dari aktivitas ekonomi. Termasuk penyewaan otoped dan skuter listrik.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Malioboro Ekwanto mengungkap telah tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Dalam mengatur aktivitas di sepanjang sumbu filosofis. Selanjutnya, kesepakatan akan dituangkan dalam regulasi. "Secepatnya (regulasi sudah jadi, Red). *Nggak* sampai (akhir bulan, Red). Tidak dalam waktu lama lagi, semua akan diterbitkan. Baik DIJ, Kota Jogja, dan

Kepolisian, sudah ada kesepakatan," lontarnya pada *Radar Jogja* di Kompleks Balai Kota Jogja kemarin (15/7).

Secara rinci, Ekwanto mengaku belum berani menyampaikan. Terkait rjrit aturan dan poin-poin yang akan diatur. Tapi Ekwanto menegaskan, sumbu filosofis harus steril dari aktivitas ekonomi. Untuk itu, dia meminta pemahaman semua pelaku usaha. "Tidak boleh ada aktivitas apapun. Mohon itu dipahami. Tidak terkecuali, termasuk itu (penyewaan otoped dan skuter listrik, Red)," Ekwanto menekankan.

Dibeberkan, pemkot akan menindak tegas. Penyewaan otoped dan skuter listrik yang nekat tetap beroperasi di kawasan sumbu filosofis. "Kalau dengan seenaknya menjajakan sekuter atau apapun namanya, itu akan kami tertibkan," sebutnya.

Ekwanto menyinggung, pedagang

kaki lima (PKL) yang telah direlokasi oleh pemkot. Kawasan yang kosong, disebut Ekwanto bukan berarti menyediakan ruang bagi aktivitas ekonomi yang lain. "Semua yang ada di sana sama halnya dengan lapak. PKL tidak ada, seolah-olah (penyewaan otoped dan skuter listrik, Red) membuat lapak baru. Jadi *nggak* boleh," serunya.

Sementara terkait dengan kawasan relokasi penyewaan otoped dan skuter listrik, Ekwanto juga belum dapat membocorkan informasi. Dia hanya menekankan, pengaturan akan ditegakkan dalam waktu dekat. "*Action* tidak lama lagi akan diterbitkan semua. Lokasi, kami belum bisa *maturl*," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja Wahyu Hendratmoko sempat menuturkan, SE Gubernur DIJ No 551/ 461 menjelaskan

bahwa kendaraan listrik tidak boleh beroperasi di kawasan sumbu filosofis. Serta upaya Pemkot Jogja menggodok peraturan wali kota (perwal).

Wahyu pun menegaskan, ingin menciptakan aktivitas wisata yang aman di Kota Jogja. Sehingga wisatawan mendapat kesan baik saat berkunjung di Kota Jogja. "Jangan asal boleh main, tapi *naudzubillah min dzalik* nanti malah kecelakaan," ujarnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumardi pun mengaku, pemkot akan terus melakukan koordinasi dengan Pemprov DIJ. Demi terwujudnya kepentingan dan kenyamanan bersama di kawasan sumbu filosofis. Termasuk sepakat dalam pengaturan otoped dan skuter listrik. "Kalau orang sedang jalan, kemudian ada yang *numpak motor banter ya mesake, nubruk uwong*," cecarnya. (**fat/eno/er**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005